Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Imposing Unreasonable Sanctions Against Motorcyclists Based on Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation in Pekanbaru City

Lisno Saputra

Universitas Lancang Kuning
(saputralisno@gmail.com)

Sudi Fahmi

Universitas Lancang Kuning
(sudi.fahmi@ymail.com)

Ardiansah

Universitas Lancang Kuning
(ardiansyah2000@yahoo.com)

Abstrak : *Pada kenyataannya banyaknya kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, yang menggunakan ponsel atau telepon genggam pada saat berkendara/ karena pada saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengendara. Seperti yang dapat kita lihat di kota pekanbaru dimana pengendara kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel seperti ojek online salah satu nya Grab, Gojek dan Maxim. Hal tersebut sangat berbahaya bagi si pengendara atau pun orang lain dan bisa terjadi kecelakaan serta di dalam Pasal tersebut sudah dengan jelas mengatakan setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal tersebut tidak ada diberikan sanksi serta efek jera oleh pihak yang berwajib dan sampai pada saat sekarang ini pengendara kendaraan masih tetap menggunakan telepon pada saat berkendara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota*

Pekanbaru adalah belum terlaksana dengan secara efektif karena penerapan denda yang dibuat dalam surat kesepakatan bersama tersebut belum memberikan efek jera kepada si pelanggar dan akibat dari penerapan denda yang ada didalam surat kesepakatan tersebut membuat si pelanggar melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah dari faktor substansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggarnya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas. Upaya Dalam Penerapan denda tersebut adalah upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, serta dengan meningkatkan faktor Internal dan faktor Eksternal diantaranya adalah memberikan tindakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi, Pengendara Motor Tidak Wajar

Abstract : In reality, many vehicles, both four-wheeled and two-wheeled, use cell phones or cell phones when driving / because they can interfere with the driver's concentration while driving. As we can see in the city of Pekanbaru where two-wheeled vehicle riders who use cellphones such as online motorcycle taxis, one of them is Grab, Gojek and Maxim. This is very dangerous for the driver or other people and accidents can occur and in that Article it is clear that every motorist driving a motorized vehicle on the road is obliged to drive his vehicle properly and with full concentration and the application of sanctions against violators

of this Article is not given. deterrent effect and deterrence by the authorities and until now motorists still use the telephone while driving. This type of research is research conducted by identifying the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is that the imposition of sanctions on motor vehicle riders that are not reasonable based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Pekanbaru City has not been carried out effectively because the application of fines made in the joint agreement letter has not had a deterrent effect on the the violator and the consequences of the application of the fines contained in the agreement letter make the offender make that mistake over and over again. Efforts to Overcome Obstacles in Imposing Unreasonable Sanctions Against Motorized Vehicle Riders Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Pekanbaru City is a factor of legal substance where the relevant regulations only impose fines for the offender, this is not considered to result deterrent effect for offenders, especially for people who come from the wealthy. Community factors also play an important role, namely that there are still many motorbike riders who do not know the function and purpose of the provisions concerning traffic. Efforts in the application of these fines are pre-emptive efforts by providing education to all levels of society regarding the prevention and impact of non-compliance with traffic regulations, preventive measures (prevention), namely the installation of traffic signs along the road as a guide for road users for the sake of creating safety, security, order, and smoothness of road traffic and transportation, and conducting regular patrols, repressive measures (prosecution) aimed at providing a deterrent effect on traffic violators, as well as by increasing internal and external factors, including taking action guidance, supervision of members as well as coordinating with other authorized parties.

Keywords: Application, sanctions, unfair, riders

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap

orang, bersifat menyamaratakan.¹ Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.³ Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia. Secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari keempat faktor tersebut, maka yang memegang peranan paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang diperhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴

Pengendara tidak yang wajar adalah rang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan, Pengendara wajib berkonsentrasi ketika mengemudikan kendaraan bermotornya. Jika lalai dan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 20.

² Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 21.

³ Soetandyo, Wignjosoebroto, 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 13.

⁴ Rinto Raharjo, 2014. *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, Hal. 80.

menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan, terancam pidana kurungan penjara 3 bulan atau denda tilang Rp 750.000. Tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor merupakan pelanggaran lalu lintas dan dapat berpotensi kecelakaan lalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dan dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.

Namun pada kenyataannya banyaknya kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, yang menggunakan ponsel atau telepon genggam pada saat berkendara/ karena pada saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Seperti yang dapat kita lihat di kota Pekanbaru dimana pengemudi kendaraan roda dua yang menggunakan ponsel seperti ojek online salah satunya Grab, Gojek dan Maxim. Hal tersebut sangat berbahaya bagi si pengemudi atau pun orang lain dan bisa terjadi kecelakaan serta di dalam Pasal tersebut sudah dengan jelas mengatakan setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib.

METODE

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Alat Komunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan⁵ Metode pendekatan secara Empiris dilakukan terhadap bahan hukum non Undang-Undang⁶, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Penerapan Sanksi Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Alat

⁵ Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 30

⁶ Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Lancang Kuning Tahun 2015.

Komunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Polisi memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri⁷ Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkannyatakan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.⁸

⁷ Indarti, Erllyn. 2014. *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*. Mmh, Jilid 43 No. 3. Hlm. 349

⁸ Halawa, SK. 2015. *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume I No.1. hlm. 2

Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas⁹. Masalah pelanggaran lalu lintas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak begitu banyak yang memberikan sorotan, dan bahkan terkesan sebagai “anak tiri”. Ilmu pengetahuan hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini masih banyak membicarakan masalahmasalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana.

Untuk penerapan pidana denda lalu lintas di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Hakim Pengadilan Negeri, Kepolisian Lalu Lintas dan Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan sanksi ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian pidana denda pelanggaran lalu lintas dari masing-masing daerah yang ada di Provinsi Riau ini bervariasi besar anggarannya. Dasar hukum berlakunya penetapan tabel denda tilang tersebut adalah berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1993. Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan tentang “Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu” yang terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu hingga saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut masih menjadi acuan dalam pembuatan kesepakatan di tingkat daerah untuk menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas.

⁹ Pasal 19 ayat 2 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa hal yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan raya adalah keselamatan diri dan keselamatan sekitarnya. Tindakan kepolisian untuk melakukan razia bukan semata-mata agar masyarakat menggunakan helm, menyalakan lampu untuk kepentingan polisi, akan tetapi untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam berkendara. Apabila sipelanggar tidak mematuhi peraturan lalu lintas bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang yang disekitarnya.

Berdasarkan kordinasi yang kami lakukan antara Pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian, setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu dan Angkutan Jalan diberikan alternatif pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas yaitu pidana penerapannya besarnya jumlah denda pelanggaran lalu lintas yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru ini tidak lagi berpedoman kepada besarnya jumlah denda yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut melainkan berpedoman pada tabel denda tilang yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, namun penerapan sanksi yang diberikan tersebut belum ada efek jeranya, karena pelanggaran yang dilakukan bisa berulang-ulang dan secara finansial mereka cukup.

Efektifitas pidana denda pelanggaran lalu lintas masih jauh dari tujuan pemidanaan, bahwa E-tilang diberlakukan untuk melakukan penertiban dalam berlalu lintas. Tanpa melakukan perubahan secara mendasar tentang aturan berlalu lintas hanya saja cara yang dilakukan sedikit berbeda, jika dalam tilang konvensional pelanggar akan diberhentikan oleh petugas dan diberi surat tilang, namun dalam E-tilang ada kemungkinan pelanggar tidak mengetahui jika telah melakukan pelanggaran. Diharapkan dengan diberlakukannya E-tilang akan membuat efek jera bagi para pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, walaupun tidak pernah tertangkap oleh petugas.

Wawancara bersama Lembaga Sosial Masyarakat bahwa Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yaitu :

“Setiap tahunnya tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut tidak menentu kadang menurun dan biasa juga meningkat. Dalam hal upaya yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan mensosialisasikan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku. Selain itu akan memberikan sarana dan prasarana seperti memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Karena kebanyakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh usia remaja. Secara tidak langsung upaya dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga membuat pidana denda tersebut menjadi efektif. Dimana dalam melakukan penindakannya berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan maraknya sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Tempat atau biasa disebut sistem damai dapat menimbulkan citra buruk terhadap polisi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya”.

Tabel denda tilang yang telah dibuat tersebut masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas karena rendahnya jumlah denda tilang yang berlaku di kampar ini. Menurut saya, jumlah denda menurut tabel denda tilang yang sudah ada tersebut sebenarnya bisa memberikan efek jera bagi pelanggar apabila denda dalam tabel tersebut diterapkan sebagai denda minimum yang artinya jumlah yang terdapat dalam tabel tersebut menjadi denda minimum yang harus dibayarkan, namun hakim disini cenderung menjatuhkan denda dibawah dari ketentuan yang ada pada tabel tersebut walaupun kami sebelum memutuskan surat keputusan untuk denda tilang pelanggaran lalu lintas mengadakan rapat (coffee morning), namun kami dari pihak kepolisian merasa bahwa denda tersebut kurang optimal karena sipelanggar sering melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut berulang-ulang.

Proses yang sama dilakukan pada saat pelaksanaan Operasi Ketertiban Lalu Lintas, yang kami lakukan di Kota Pekanbaru dimana jika terjadi pelanggaran maka petugas mencatat pelanggaran melalui aplikasi yang sudah tersedia pada smartphonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan sistem aplikasi E-tilang ini lalu mengeluarkan pasal pelanggaran dan denda maksimal yang harus dibayarkan oleh pelanggar. Setelah angka keluar, si pengendara dapat langsung membayar melalui teller, ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI), ATM Bersama, ataupun SMS/Internet Banking. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pengendara dapat menunjukkan bukti bayar kepada polisi lalu mengambil kembali Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang disita oleh petugas kami. E-tilang

terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut. Apalagi kami di Polresta Pekanbaru ini akan memasang CCTV disetiap jalan seperti yang di lakukan oleh negara luar negeri, dan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di Kota Pekanbaru, seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan Automatic Traffic Control System (ATCS) di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak. Ketika pelanggaran lalu lintas terbukti melakukan kesalahan maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme E-tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut :Polisi menindak dengan menggunakan formulir berwarna merah, penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan, Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang, Bila pelanggar tidak hadir, Polisi wajib 2 kali memanggil dan ke-3 (tiga) kalinya melakukan penangkapan, Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Dari mekanisme diatas, maka aplikasi E-tilang akan mengadaptasi proses diatas, dan yang perlu diperhatikan adalah form tilang akan diformat dalam bentuk digital sehingga yang didapat oleh pelanggar hanya berupa ID Form Tilang yang mewakili ke semua data yang tersimpan.

Ada manfaat pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah :

a. Terbuka atau Transparansi

Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan aplikasi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas dapat dikatakan bahwa dengan system E-Tilang ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaanpertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan juga diharapkan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

c. Responsif

Kepada pihak berwenang akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

d. Keadilan

Di dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang.

Berdasarkan kesepakatan bersama atau sejak berlakunya tabel denda tilang yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Pserta Kepala Kepolisian telah dilakukan sosialisasi baik yang dilakukan oleh pihak pengadilan, pihak kejaksaan dan kepolisian ada tiga cara pembayaran denda dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru:

- a. Untuk denda titipan, pelanggar dapat menitipkan dendanya kepada yang mempunyai kuasa untuk itu (kepolisian) dengan alasan si pelanggar ingin melanjutkan perjalanan dan tidak dapat mengikuti persidangan maka pelanggar menitipkan denda tersebut kepada petugas yang mempunyai kuasa supaya tidak ada jaminan yang disita petugas. Kemudian petugas itu yang menyampaikan atau menyetorkan denda itu ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan berkas tilang titipan tersebut.
- b. Setoran langsung, pelanggar dapat membayar dan menyetornya langsung

ke bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan menunjukkan surat tilangnya dan menyimpan bukti pembayarannya untuk mengambil jaminan atau barang yang disita oleh petugas.

- c. Kalau dulu harus hadir dalam persidangan, pelanggar mengikuti persidangan yang telah ditentukan waktunya oleh petugas kepolisian di dalam surat tilangnya dan membayar langsung dendanya di Pengadilan sesuai dengan putusan yang telah ditentukan hakim namun sekarang ini setelah ada E-tilang sangat membantu kami pihak pengadilan menjadikan tertib dan bebas dari calo.

Hasil observasi penulis adalah masih belum dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak memberi efek jera kepada pelanggar lalu lintas, karena rendahnya jumlah denda yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada pelanggar lalu lintas, sehingga para pelanggar lalu lintas merasa mampu untuk membayar sanksi denda yang diberikan, selain itu pengawasan dari petugas lalu lintas tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang diawasi sehingga menyebabkan tidak merata dan lemahnya pengawasan terhadap para pelanggar.¹⁰

Wawancara bersama Lembaga Sosial Masyarakat tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yaitu :

“Setiap tahunnya tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut tidak menentu kadang menurun dan biasa juga meningkat. Dalam hal upaya yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan mensosialisasikan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku. Selain itu akan memberikan sarana dan prasarana seperti memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Karena kebanyakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh usia remaja. Secara tidak langsung upaya dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga membuat pidana denda tersebut menjadi efektif. Dimana dalam melakukan penindakannya berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan maraknya sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Tempat atau biasa disebut sistem damai dapat menimbulkan citra buruk terhadap polisi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya”

¹⁰ Hasil Observasi Penulis Dilapangan

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru

Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar. Atau dengan kata lain pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan melanggar adalah melewati atau melalui dengan tidak sah, menubruk, menabrak, menyalahi, melawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi pelanggaran yaitu pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau perkara melewati, melalui dengan tidak sah, menabrak, menyalahi, melawan, yang berhubungan dengan arus bolak-balik, hilir mudik atau perjalanan di jalan, perhubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.¹¹ substansi mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari struktur, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas struktur dan substansi. Masih diperlukan adanya unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum.¹²

Terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam tatanan Legal Substance dapat dilihat dari rumusan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (Law As Tool Of Social Engineering).¹³ Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut. sehingga peran criminal justice system terhadap

¹¹ Febri Rahadian, Kajian Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak, <http://febryrahadian.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

¹² Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 129.

¹³ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 90.

penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas harus didasarkan pada pencapaian usaha untuk melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan mengarahkan secara Integrited (terpadu) seluruh komponen perangkat aturan lalu lintas dan aparaturnya penegak tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru terdiri dari 2 (dua) Kendala yaitu :

1. Kendala Internal yang terdiri masih kurangnya jumlah personil yang menangani dilapangan, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menangani pelanggaran lalu lintas ini.
2. Kendala Eksternal yang terdiri kurangnya kesadaran pelaku pelanggaran lalu lintas.

Ada beberapa hal pokok yang menjadi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, seperti yang terdapat didalam penulis buku soerjono di antaranya:

- a. Faktor hukumannya sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membetuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni liingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Kendala dari penegak hukum kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum.
- b. Dari masyarakat, Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tentang lalu lintas pada umumnya dan usia untuk pelajar yang bisa mendapatkan surat izin mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kurangnya etika

pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat salah satu contoh kurangnya etika berkendara oleh pengemudi adalah adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara besar hal ini tentu saja mengganggu pengguna jalan yang lain.

Menurut Kasat Lantas menyatakan bahwa kami melaksanakan E-tilang adalah aksesibilitas jaringan aplikasi dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan aplikasi E-Tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan E - Tilang di lapangan dan menyebabkan hal ini sebagian masyarakat kabupaten rokan hulu yang belum memahami program E-Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai sebuah proses yang berbelit. Belum banyaknya masyarakat yang memiliki aplikasi E-Tilang ini dikarenakan sosialisasi yang kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan manfaatnya bagi masyarakat. Data Kepolisian tentang kepemilikan kendaraan belum terintegrasi dengan data dari lintas daerah baik regional maupun nasional. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Dengan menggunakan layanan nir kabel dimana hal ini menjadi sasaran serangan hacker. Jika tidak ditanggulangi sejak awal, serangan ini bisa merusak seluruh rencana yang sudah disusun Polri untuk memperbaiki sistem di Kepolisian.

Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, kami jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar lalu lintas melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima. Kenyataannya aturan tersebut tidak efektif berlaku, mengingat untuk dapat mengambil sisa uang titipan pembayar atau pelanggar harus mengurus sendiri melalui pengadilan atau kejaksaan. Sehingga menambah kerumitan proses bagi pelanggar lalu lintas yang sudah mengakui kesalahannya.

Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan.

a. Faktor manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Manusia karena etika, sopan-santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia.

c. Faktor Lingkungan

Karena denda yang di berikan itu lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu.

Kendala yang dihadapi Penerapan Denda Pelanggaran Lalu Lintas di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendala-kendala imaterial dan materil. Kendala materil yang dipersiapkan hakim sebelum sidang pidana pelanggaran lalu lintas, hakim mempersiapkan, kami hakim mempersiapkan sebelum pengambilan keputusan perkara dalam sidang pelanggaran lalu lintas adalah mempersiapkan berkas dan pasal-pasal peraturan peundang-undangan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan dan Pada persiapan immaterial, kami hakim mempersiapkan sikap untuk berada pada jalur penegak hukum serta Hakim harus mampu menempatkan diri secara obyektif sebagai alat Negara untuk menegakkan hukum, sehingga dalam setiap

putusan yang kami lakukan berdasarkan pertimbangan hukum, bukan atas dasar emosi semata.

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan di namakan norma sosial yang di antaranya norma hukum itu sendiri. Kaidah atau normanorma hukum itu adalah : “Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat”. Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang di tentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara. Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturanperaturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat Preventif maupun Represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah :

1. Faktor internal polisi lalu lintas Tindakan Preventif

Merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Hukum sebagai dasar dari kepolisian pemberlakuan diskresi haruslah dibenahi agar lebih memberikan peluang kepada aparat kepolisian dan tidak terbentur antara dua kepentingan, yaitu kepentingan hukum positif yang berlaku dan hukum yang hidup berkembang di tengah masyarakat. Pembentukan hukum yang buruk akan berimbas kepada penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Dalam pembuatan peraturan kebijakan bersama ini juga pejabat hakim haruslah memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, agar tidak ada lagi ketimpangan hukum antara hukum positif

yang diberlakukan dan di general kan keseluruh masyarakat Indonesia yang sudah tentu pada dasarnya sangat berbeda dari sabang sampai merauke.

Tindakan Preventif

alah merupakan suatu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas, untuk melaksanakan hal tersebut polisi melakukan beberapa tindakan antara lain patroli rutin polisi setiap hari maupun patroli gabungan bersama pihak terkait, melaksanakan pos-pos tetap dalam menanggulangi secara cepat apabila kecelakaan lalu lintas, dan menurunkan personil secara intensif kepada daerah rawan kecelakaan dan rawan macet.

Tindakan Represif

Sebuah tindakan yang dilakukan polisi secara nyata terhadap setiap pelanggaran lalu lintas yang mana pelanggaran tersebut seharusnya mendapatkan sanksi, hal ini dikarenakan pembuktian yang rumit karena faktor manusia lebih dominan terhadap pelanggar lalu lintas. Kepolisian juga tidak pernah menegur secara langsung maupun tidak langsung penyelenggara jalan karena menjaga nama baik instansi tersebut, jadi upaya yang dilakukan kepolisian hanyalah koordinasi terpadu. Padahal hal tersebut merupakan suatu aturah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas.

2. Faktor eksternal polisi lalu lintas

Membangun budaya tertib berlalu lintas Budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran bagi masyarakat. Polisi juga hendaknya cepat dan tegas terhadap pelanggar lalu lintas, bukan hanya pengguna masyarakat yang punya kesadaran melainkan kerjasama antara aparat penegak hukum.

Meningkatkan partisipasi masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat harus dilatar belakangi dari sosialisasi kepolisian dalam memberikan penyuluhan terhadap lalu lintas. Masyarakat sendiri harus mempunyai kepekaan terhadap perkembangan hukum, dengan adanya kepekaan hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Peran penting masyarakat juga ikut serta mengawasi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan amanat undang-undang. Masyarakat disini tampak sangat minim.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah dan adapun upaya yang dilakukan adalah :

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Kesatuan Lalu Lintas antara lain :

- a. Penyuluhan tentang berlalu lintas
- b. Polisi menyapa masyarakat yang dilaksanakan secara rutin tiap.
- c. Pelatihan berlalu lintas
- d. Pelatihan ini ditujukan kepada seluruh tukang parker yang ada di Provinsi Riau.
- e. Pelayanan pembuatan SIM
- f. Pelayanan pembuatan SIM telah dilaksanakan dengan baik, misalnya saja pelayanan pembuatan SIM juga telah hadir di beberapa mall Makassar sehingga mempermudah warga dalam pengurusan SIM.
- g. Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet, dan penyebaran brosur. Hal ini dapat kita lihat disepanjang jalan seperti anjuran untuk memakai helm standar.
- h. Pemasangan rambu-rambu peringatan dengan bekerja sama dengan jasa raharja.

Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan palaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan adalah :

Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada palanggar yang tidak terlalu fatal seperti mengendarai kendaraan dengan membawa anak atau diberikan bagi anak sekolah dibawah umur yang melakukan pelanggaran.

Penindakan dengan pemberian surat tilang Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan

tilang. Hal ini dapat kita lihat ketika ada operasi/sweping yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat, maupun marka/rambu.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelanggaran perkara tilang, kerjasama antar institusi, baik Pengadilan, Kepolisian, maupun Kejaksaan, adalah keharusan yang patut didorong dan dioptimalkan. Kerjasama tersebut juga patut dibangun dalam bangunan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Dimana esensinya adalah adanya keterpaduan dan keselarasan antar sub-sistem peradilan pidana. Berjalan lancar atau tidaknya satu sub-sistem akan berpengaruh kepada sub-sistem yang lain. Kesatupaduan institusi itu dapat dikonstruksikan dalam hubungan : Organisasional, Fungsional, dan Administrasional.

Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat juga institusi di luar subsistem peradilan pidana, yang memiliki peran cukup sentral dalam pelaksanaan pengelolaan perkara tilang, yaitu bank. Peran bank adalah sebagai penerima uang titipan untuk uncostested offender (pelanggar yang tidak membantah). Selain itu, bank juga berperan sebagai penerima uang setelah besaran denda diputus oleh hakim dan dieksekusi oleh jaksa.

Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas
2. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati ke hati, menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat
3. Melakukan program citra polantas, Program ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, dan juga untuk merubah pandangan masyarakat terhadap citra polisi yang selama ini banyak berkonotasi

negatif. Dengan adanya program ini diharapkan kepada kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Program tersebut meliputi sejumlah kegiatan antaranya: a) Pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas; b) Penegakan hukum c) Sosialisasi dan kampanye lalu lintas yang dilakukan tidak selalu ditempat tertentu tetapi juga dilakukan ditempat-tempat santai seperti: warung-warung kopi dan lain-lain.

Hasil observasi penulis dilapangan adalah Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah dari faktor substansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggarnya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru tersebut adalah upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, serta dengan meningkatkan faktor Internal dan faktor Eksternal diantaranya adalah memberikan tindakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang.

Wawancara bersama Lembaga Sosial Masyarakat tentang Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yaitu :

“Setiap tahunnya tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut tidak menentu kadang menurun dan biasa juga meningkat. Dalam hal upaya yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan mensosialisasikan tentang tata

cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku. Selain itu akan memberikan sarana dan prasarana seperti memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan fungsinya. Karena kebanyakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh usia remaja. Secara tidak langsung upaya dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga membuat pidana denda tersebut menjadi efektif. Dimana dalam melakukan penindakannya berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan maraknya sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Tempat atau biasa disebut sistem damai dapat menimbulkan citra buruk terhadap polisi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.”.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang mejadi kajian ini sebagai Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah belum terlaksana dengan secara efektif karena penerapan denda yang dibuat dalam surat kesepakatan bersama tersebut belum memberikan efek jera kepada si pelanggar dan akibat dari penerapan denda yang ada didalam surat kesepakatan tersebut membuat si pelanggar melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah dari faktor subttansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggarnya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas. Upaya Dalam Penerapan denda tersebut adalah upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang

bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, serta dengan meningkatkan faktor Internal dan faktor Eksternal diantaranya adalah memberikan tindakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Cipta.
- Abdussalam. H. R, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum (Stetsel , Tindak, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum)*, Bagian 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aditya Bakti. Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum* , Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ashshofa. Burhan, 2004, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinamar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdan.M, 2012, *Alasan Penghapus Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.M Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, Yogyakarta: Prestasi Pustaka.
- Marzuni. Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2008, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Prakoso. Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prasetyo. Teguh, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Putranto. Leksmono Suryo, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Mancanan jaya Cemerlang.
- Sianturi. Kanterdan S. R., 2002, *Asas Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Gratifika.
- Soemitro. Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 1995, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Susanto. Anton F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Retika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan*, Bandung: Widya Padjadjaran